JAID | JOURNAL OF ADMINISTRATION AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT
E-ISSN : 2808-7135

POLITEKNIK IMIGRASI POLTEKIM

PERAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

THE ROLE OF PUBLIC PARTICIPATION IN STRENGTHENING DEMOCRACY AND PROTECTING HUMAN RIGHTS IN INDONESIA

https://10.0.205.137/jaid.v4i2.643

Submitted: 16-10-2024 Reviewed: 11-10-2024 Published: 13-11-2024

Bong Bong Prakoso Napitupulu
bongnapitupulu@gmail.com
Universitas Indonesia

Abstract. *Democracy in Indonesia provides space for the people to participate in the political process, with human rights (HR) serving as a fundamental element underpinning the system. Public participation plays a crucial role in strengthening democracy and protecting human rights, ensuring that government policies align with the people's interests and preventing the misuse of power. This study aims to analyze the role of public participation in enhancing democracy and improving human rights protection in Indonesia. The method used is a literature review, examining various secondary sources such as academic journals, books, research reports, and government documents related to the topic. The findings indicate that active public participation in politics, including electoral processes, policy oversight, and involvement in public policymaking, significantly contributes to strengthening Indonesia's democratic system. Additionally, public participation has proven to support human rights protection by pressuring the government to be more responsive to the people's aspirations, particularly regarding law enforcement and social justice. In conclusion, increasing public participation is essential to reinforce democracy and human rights protection. The implications are that the government needs to expand access and opportunities for political participation for all societal groups, especially marginalized ones. Recommendations include enhancing political education and providing transparent access to information so that the public can participate more actively and effectively.*

Keywords*: public participation; democracy; human rights; indonesia; human rights protection.*

Abstract. *Demokrasi di Indonesia memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik, dan hak asasi manusia (HAM) menjadi elemen penting yang melandasi sistem tersebut. Partisipasi publik memiliki peran krusial dalam penguatan demokrasi dan perlindungan HAM, memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingan rakyat dan menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eran partisipasi publik dalam memperkuat demokrasi serta meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan meninjau berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan*

JAID: Journal of Administration and International Development are licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

dokumen pemerintah terkait topik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam politik, termasuk dalam proses pemilihan umum, pengawasan kebijakan, serta keterlibatan dalam pembuatan kebijakan publik, berkontribusi signifikan terhadap penguatan sistem demokrasi di Indonesia. Selain itu, partisipasi publik juga terbukti mendukung perlindungan HAM dengan menekan pemerintah untuk lebih responsif terhadap aspirasi rakyat, terutama dalam hal penegakan hukum dan keadilan sosial. Kesimpulannya, peningkatan partisipasi publik sangat diperlukan untuk memperkuat demokrasi dan perlindungan HAM. Implikasinya, pemerintah perlu memperluas akses dan kesempatan partisipasi politik bagi semua kelompok

masyarakat, terutama kelompok marginal. Saran yang diberikan adalah meningkatkan pendidikan politik dan akses informasi yang transparan, sehingga masyarakat dapat lebih aktif dan efektif dalam berpartisipasi

Keywords: partisipasi publik; demokrasi; hak asasi manusia; Indonesia; perlindungan HAM.

1. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk menentukan kebijakan dan keputusan politik melalui mekanisme partisipatif, seperti pemilihan umum yang bebas dan adil (Cornelia dkk, 2024). Dalam teori politik, demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang paling representatif karena melibatkan rakyat secara langsung dalam proses pembuatan keputusan. Prinsip dasar demokrasi mencakup kebebasan individu, kesetaraan di hadapan hukum, dan adanya mekanisme kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi yang sehat, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih (Riyani & Putri, 2023).

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, atau politik. HAM mencakup hakhak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang diakui secara universal dan dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional (Darajati & Syafei, 2020). Di Indonesia, HAM diatur dalam konstitusi dan dilindungi oleh berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam perspektif demokrasi, HAM menjadi fondasi utama yang memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan yang sama, kebebasan berekspresi, dan hak untuk menjalani kehidupan dengan bermartabat.

Partisipasi publik menjadi elemen krusial dalam penguatan sistem demokrasi. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat menyuarakan aspirasi dan kepentingannya, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Partisipasi publik tidak hanya terbatas pada pemilu, tetapi juga mencakup kegiatan seperti keterlibatan dalam pembuatan kebijakan publik, diskusi kebijakan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan pemerintahan. Semakin tinggi tingkat partisipasi publik, semakin kuat kontrol masyarakat terhadap kekuasaan negara, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar mewakili kepentingan rakyat (Riskiyono, 2022).

Dalam demokrasi yang ideal, partisipasi publik juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi warga negara. Dengan berpartisipasi, masyarakat dapat

memahami lebih dalam tentang mekanisme pemerintahan, proses pembuatan kebijakan, dan hak-hak politik yang mereka miliki. Oleh karena itu, partisipasi publik berkontribusi langsung pada peningkatan kesadaran politik dan memperkuat legitimasi pemerintah. Tanpa partisipasi yang memadai, demokrasi bisa berubah menjadi oligarki di mana keputusan penting hanya diambil oleh segelintir elit (Kontu dkk, 2024).

Situasi demokrasi dan HAM di Indonesia saat ini menunjukkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, Indonesia berhasil membangun sistem demokrasi pasca-Reformasi 1998 yang ditandai dengan pemilihan umum yang demokratis dan relatif bebas. Namun, di sisi lain, berbagai tantangan masih menghadang, seperti korupsi, manipulasi kekuasaan, dan kurangnya partisipasi politik dari kelompok marginal. Selain itu, perlindungan HAM juga masih mengalami berbagai tantangan, terutama dalam hal kebebasan berekspresi, hak minoritas, dan penegakan hukum yang adil. Pelanggaran HAM dalam bentuk kekerasan oleh aparat negara maupun kelompok non-negara masih terjadi, yang menandakan bahwa Indonesia perlu terus berbenah dalam upaya penguatan demokrasi dan perlindungan HAM.

Melihat kondisi ini, peran partisipasi publik menjadi semakin vital dalam memperkuat demokrasi dan menjamin perlindungan HAM. Dengan tingginya partisipasi, masyarakat dapat menekan pemerintah untuk lebih responsif terhadap aspirasi publik dan memperbaiki kinerja lembaga-lembaga negara. Di sinilah urgensi penelitian ini muncul, yaitu untuk mengeksplorasi hubungan antara partisipasi publik, penguatan demokrasi, dan perlindungan HAM di Indonesia. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi berbagai bentuk partisipasi publik yang efektif dan bagaimana partisipasi tersebut dapat memperbaiki situasi demokrasi dan HAM di Indonesia.

Penelitian ini dipilih karena relevansinya dengan situasi politik Indonesia saat ini, di mana isu-isu demokrasi dan HAM semakin mendesak untuk dibahas. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi konkret untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik, serta memperkuat perlindungan HAM yang masih terancam oleh berbagai faktor, seperti kekerasan politik, diskriminasi, dan ketidakadilan hukum. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif dan demokratis.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran partisipasi publik dalam memperkuat demokrasi dan perlindungan HAM di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung terciptanya iklim politik yang lebih demokratis dan menghormati hak asasi manusia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis peran partisipasi publik dalam penguatan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan meninjau berbagai sumber sekunder yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku,

laporan penelitian, dan dokumen resmi pemerintah yang terkait dengan partisipasi publik, demokrasi, dan HAM. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, terutama yang memberikan perspektif teoretis maupun empiris mengenai peran partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perlindungan HAM.

Pengumpulan data dilakukan melalui eksplorasi sistematis terhadap karya-karya akademik dan kebijakan yang diterbitkan antara tahun 2014 hingga 2024. Penelitian ini menitikberatkan pada hasil analisis dan pemikiran dari berbagai penulis yang telah mengkaji tema terkait partisipasi publik dalam konteks demokrasi, HAM, serta tantangan dan peluangnya di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk memahami bagaimana konsep-konsep yang ada diterapkan dalam konteks politik dan HAM di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam memperkuat partisipasi publik di negara ini.

3. PEMBAHASAN

3.1. PERAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM DEMOKRASI

Partisipasi masyarakat dalam proses politik merupakan bagian penting dalam demokrasi, terutama dalam pemilihan umum (pemilu). Sahbana (2017) menjelaskan bahwa negara yang demokratis memposisikan rakyat sebagai tokoh utama dalam pembuatan kebijakan. Pemilu menjadi mekanisme utama bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka melalui pemilihan eksekutif dan legislatif di tingkat nasional maupun daerah. Namun, Sahbana (2017) juga menyoroti pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara cerdas dan tidak asal memilih. Pendidikan politik yang efektif memungkinkan masyarakat untuk memahami dampak dari keputusan politik yang di buat, sehingga pilihan mereka lebih mencerminkan kepentingan bersama daripada sekadar kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Di sisi lain, peran masyarakat dalam demokrasi tidak hanya terbatas pada pemilihan, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap jalannya proses demokrasi. Nurkinan (2018) menekankan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas yang turut menjaga integritas proses pemilu. Dalam konteks ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membutuhkan dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan jujur dan adil. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu membantu mencegah kecurangan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Nurkinan menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu juga berfungsi sebagai bentuk aktualisasi kedaulatan rakyat, yang merupakan esensi dari demokrasi itu sendiri.

Selain itu, perkembangan partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik juga mencakup berbagai bentuk kebebasan, seperti kebebasan berpendapat, bekerja, dan mengakses pendidikan. Kusmanto (2014) menunjukkan bahwa kebebasan ini memainkan peran penting dalam demokrasi, terutama dalam menciptakan ruang yang inklusif bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan politik. Pada tingkat lokal, partisipasi masyarakat terlihat dalam forum-forum seperti rapat pembangunan desa, di mana warga bebas memberikan aspirasi dan kritik. Dengan adanya kebebasan ini, warga negara memiliki peluang yang lebih besar untuk

mempengaruhi kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.
Mashuri (2014) mengaitkan partisipasi masyarakat dengan pembangunan politik yang berkelanjutan. Penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi rakyat sangat penting bagi negara yang mengklaim dirinya sebagai demokrasi. Dalam pandangannya, partisipasi publik tidak hanya terbatas pada suara dalam pemilu, tetapi juga mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan politik. Mashuri (2014) berargumen bahwa pendidikan politik dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam berpolitik, sehingga dapat berkontribusi secara lebih efektif terhadap pembangunan demokrasi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bahwa dalam masyarakat plural seperti Indonesia, nilai-nilai demokrasi harus diintegrasikan ke dalam berbagai lembaga politik dan sosial untuk mendukung pembangunan politik yang lebih inklusif.
Teknologi dan media sosial juga memainkan peran penting dalam memperluas partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Fitriani et al. (2023) menyoroti bahwa di era digital saat ini, teknologi informasi dan media sosial telah mengubah cara masyarakat terlibat dalam proses politik. Media sosial membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi politik, menyuarakan pendapat, dan berinteraksi langsung dengan pemimpin politik. Namun, meskipun teknologi memperluas partisipasi, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada tantangan yang perlu diatasi, seperti misinformasi, polarisasi politik, dan penyebaran ujaran kebencian yang sering terjadi di media sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana teknologi dapat digunakan secara efektif untuk memperkuat demokrasi sambil meminimalkan dampak negatifnya.
Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam demokrasi mencakup berbagai aspek, mulai dari pemilihan umum, pengawasan terhadap proses politik, kebebasan individu, hingga penggunaan teknologi untuk memperluas partisipasi. Setiap bentuk partisipasi ini penting untuk memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat terjamin dalam sistem politik yang mereka jalani.

3.2. HUBUNGAN ANTARA PARTISIPASI PUBLIK DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Partisipasi publik merupakan elemen fundamental dalam upaya melindungi hak asasi manusia (HAM). Wibawa (2019) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan contoh nyata dari keterlibatan masyarakat dalam perlindungan HAM, terutama hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki peran tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pengawas dalam memastikan bahwa perlindungan lingkungan berjalan sesuai aturan. Namun, Wibawa (2019) menyoroti bahwa saat ini peran partisipatif masyarakat masih terbatas pada penyuluhan dan penyampaian informasi, sehingga perlu optimalisasi lebih lanjut agar masyarakat lebih proaktif dalam menjaga lingkungan yang sehat, yang merupakan hak dasar manusia.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perlindungan HAM juga tercermin dalam jaminan hak politik warga negara. Kambu (2021) menguraikan bahwa hak memilih dan dipilih dalam pemilu, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, merupakan bentuk penting dari partisipasi politik yang memampukan setiap warga negara untuk ikut menentukan arah kebijakan negara. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak politik,

tetapi juga terkait erat dengan perlindungan HAM secara keseluruhan, karena memungkinkan warga negara untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan. Kambu (2021) juga menekankan bahwa dengan memiliki status sebagai warga negara, individu memiliki hak dan kewajiban timbal balik dengan negara, termasuk hak untuk terlibat dalam proses politik secara adil dan setara.

Dalam konteks perlindungan anak, Wasiati (2020) menyoroti peran penting orang tua dalam melindungi hak anak sebagai bagian dari HAM. Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak sejak lahir hingga dewasa, sesuai dengan Undang- Undang Perlindungan Anak. Wasiati (2020 menegaskan bahwa kegagalan orang tua dalam melindungi anak dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM, yang akan memiliki implikasi hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam menjaga hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Pada tingkat masyarakat yang lebih luas, Acep et al. (2023) menguraikan bahwa partisipasi publik dalam mempromosikan multikulturalisme dan inklusivitas juga berperan penting dalam melindungi HAM. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam masyarakat diperlukan untuk membangun lingkungan yang menghargai perbedaan dan mendorong inklusivitas. Dampak dari partisipasi semacam ini tidak hanya pada peningkatan toleransi antarbudaya, tetapi juga pada perlindungan HAM, khususnya dalam menciptakan masyarakat yang menghormati hak-hak individu tanpa memandang latar belakang budaya atau identitas mereka.

Selian dan Melina (2018) menekankan bahwa kebebasan berekspresi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan menegakkannya. Pasca-reformasi di Indonesia, masyarakat memiliki kebebasan lebih besar untuk mengekspresikan pandangan, tetapi kebebasan ini perlu diimbangi dengan pengawasan dan tanggung jawab. Partisipasi masyarakat dalam menjaga kebebasan berekspresi penting untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan tersebut, sekaligus melindungi hak-hak individu lainnya.

Kurnia (2024) menambahkan bahwa demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia mengintegrasikan nilai-nilai HAM seperti kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Partisipasi publik dalam sistem demokrasi Pancasila menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM dijalankan dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, partisipasi publik tidak hanya relevan dalam konteks politik, tetapi juga dalam menjamin bahwa prinsipprinsip HAM tetap menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan di Indonesia.

Terakhir, Pasapan (2020) menguraikan hubungan erat antara perlindungan lingkungan hidup dan HAM. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari HAM yang harus dilindungi oleh negara melalui berbagai instrumen hukum. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan juga diperlukan untuk memastikan bahwa hak ini terpenuhi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam upaya global untuk melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Dengan demikian, partisipasi publik memainkan peran krusial dalam berbagai

aspek perlindungan HAM, mulai dari hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak-hak politik, perlindungan anak, hingga kebebasan berekspresi. Setiap bentuk partisipasi ini membantu memperkuat perlindungan HAM secara holistik dan memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi di berbagai bidang kehidupan.

3.3. TANTANGAN DAN PELUANG PENGUATAN DEMOKRASI DAN HAM DI INDONESIA MELALUI PARTISIPASI PUBLIK

Penguatan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga menawarkan peluang melalui peningkatan partisipasi publik. Salah satu tantangan utama adalah ancaman radikalisme yang berpotensi merusak keutuhan negara dan menghambat proses demokrasi. Menurut Budijanto dan Rahmanto (2021), pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM berupaya mencegah penyebaran paham radikal dengan memberikan pendidikan HAM yang menekankan nilai-nilai Pancasila dan toleransi. Pendidikan HAM ini diharapkan mampu mengikis paham radikal melalui pendekatan yang tidak kekerasan serta mengedepankan prinsip-prinsip HAM. Pendekatan semacam ini menjadi langkah preventif penting dalam memperkuat demokrasi, karena partisipasi publik yang sehat hanya dapat terwujud jika terdapat penghormatan terhadap HAM dan toleransi dalam masyarakat.

Selain ancaman radikalisme, terdapat pula tantangan dalam mengakomodasi partisipasi masyarakat kelas menengah ke bawah dalam proses politik. Nainggolan dan Ivanna (2024) mencatat bahwa meskipun demokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan inklusif, partisipasi kelompok ini seringkali terhambat oleh faktor ekonomi dan keterbatasan akses informasi. Namun, kemajuan teknologi dan program pemberdayaan masyarakat menawarkan peluang untuk mengatasi hambatan tersebut, terutama dengan kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat. Dalam hal ini, peningkatan akses informasi dan pemberdayaan komunitas menjadi elemen penting dalam memperkuat partisipasi politik masyarakat menengah ke bawah dan, pada akhirnya, memperkuat demokrasi.

Selain itu, peran intelijen dalam demokrasi juga menjadi tantangan yang signifikan. Arbani (2023) menekankan bahwa reformasi intelijen di Indonesia, meskipun dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM, masih menghadapi kendala dalam penerapannya.

Intelijen dapat memainkan peran penting dalam mendukung demokrasi jika penegakan hukum berjalan dengan baik. Namun, upaya ini menghadapi tantangan besar karena praktik-praktik intelijen yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip reformasi. Tantangan ini menunjukkan bahwa selain partisipasi publik, lembaga negara lainnya seperti intelijen juga harus beradaptasi dengan tuntutan demokrasi agar HAM dapat terjaga dan demokrasi dapat berkembang.

Dalam konteks sistem politik, Cornelia, Anastasya, dan Priliska (2024) menunjukkan bahwa sejak reformasi 1998, Indonesia telah mengalami transformasi signifikan menuju demokrasi, dengan pemilu sebagai mekanisme utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Meskipun begitu, tantangan seperti politik uang, politik identitas, dan penyebaran informasi palsu masih membayangi

proses pemilu. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat mekanisme pemilu yang akuntabel dan transparan agar prinsip-prinsip demokrasi dapat ditegakkan dan partisipasi publik yang lebih representatif dapat tercapai.

Sementara itu, Riskiyono (2022) menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi, yang seharusnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan. Namun, praktik politik transaksional seringkali mengabaikan transparansi dan partisipasi masyarakat, yang seharusnya diatur dalam UU No. 12/2011. Situasi ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih perlu diperkuat melalui pengawasan dan partisipasi publik yang lebih besar dalam proses legislasi untuk mencegah dominasi elit politik.

Secara keseluruhan, tantangan penguatan demokrasi dan HAM di Indonesia, baik dari ancaman radikalisme, partisipasi masyarakat menengah ke bawah, hingga peran intelijen dan transparansi dalam proses politik, memerlukan solusi yang melibatkan kerja sama berbagai pihak. Peluang untuk memperkuat demokrasi di Indonesia terbuka lebar, namun diperlukan komitmen bersama untuk memastikan bahwa partisipasi publik dapat terfasilitasi secara optimal dan efektif.

4. KESIMPULAN

Partisipasi publik memainkan peran sentral dalam memperkuat demokrasi dan melindungi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Keterlibatan masyarakat, baik dalam proses politik seperti pemilu maupun dalam pengawasan jalannya demokrasi, memperkuat legitimasi pemerintahan dan integritas proses politik. Pendidikan politik yang tepat, penggunaan teknologi, dan kebebasan berpendapat merupakan aspek penting yang mendukung partisipasi masyarakat secara lebih inklusif. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perlindungan HAM, seperti hak atas lingkungan yang sehat dan hak politik, menunjukkan bahwa demokrasi yang kuat juga berperan dalam menjamin hak-hak individu dan kelompok secara lebih luas.

Untuk memperkuat demokrasi dan perlindungan HAM di Indonesia, penting bagi pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan politik dan teknologi yang dapat meningkatkan partisipasi publik secara efektif. Pemerintah juga perlu memperbaiki regulasi yang mendukung pengawasan masyarakat dalam proses politik dan legislasi untuk memastikan transparansi. Selain itu, perlu ada kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya guna mengatasi tantangan seperti radikalisme, politik uang, dan kesenjangan partisipasi di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah.

REFERENSI

Acep, V. D. A., Murtini, E., & Santoso, G. (2023). Menghargai perbedaan: Membangun masyarakat multikultural. Jurnal Pendidikan Transformatif, 2(2), 425-432.

Arbani, M. (2023). Peran intelijen dalam keberlangsungan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Jurnal Syntax Transformation, 4(7), 91-100.

Budijanto, O. W., & Rahmanto, T. Y. (2021). Pencegahan paham radikalisme melalui optimalisasi pendidikan hak asasi manusia di Indonesia. Jurnal Ham,

12(1), 57.
Cornelia, G., Anastasya, T. R., & Priliska, J. A. (2024). Implementasi prinsip demokrasi dalam hukum tata negara: Tinjauan terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan, 8(1), 295-302.
Darajati, M. R., & Syafei, M. (2020). Politik hukum pembentukan dua kovenan HAM internasional tentang hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya. Syiah Kuala Law Journal, 4(2), 106-122.
Fitriani, D., Budiyani, Y., Hardika, A. R., & Choerunissa, M. (2023). Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia: Analisis peran teknologi dan media sosial. Advances In Social Humanities Research, 1(4), 362-371.
Kambu, W. M. (2021). Tinjauan yuridis tentang hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Lex Et Societatis, 9(1).
Kontu, F., Haris, U., Laode, I. C., Oja, H., & Atbar, S. (2024). Pendampingan masyarakat dalam mengakses dan memahami hak-hak politik. Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia, 3(2), 07-15.
Kusmanto, H. (2014). Partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 2(1), 78-90.
Kurnia, Y. R. (2024). Perlindungan hak asasi manusia dan tantangan demokrasi dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila di Indonesia. Innovative: Journal of Social Science Research, 4(4), 3612-3623.
Mashuri, M. (2014). Partisipasi masyarakat sebagai upaya pembangunan demokrasi. Menara Riau 13(2), 178-186.
Nainggolan, J. A., & Ivanna, J. (2024). Tantangan dan peluang partisipasi masyarakat menengah ke bawah dalam proses politik dan pemerintahan di Bandung. Journal on Education, 6(4), 19208-19216.
Nurkinan, N. (2018). Peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum serentak anggota legislatif dan Pilres tahun 2019. Jurnal Politikom Indonesiana, 3(1), 26-26.
Pasapan, P. T. (2020). Hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup. Paulus Law Journal, 1(2), 48-58.
Riskiyono, J. (2022). Pengaruh partisipasi dan pengawasan publik dalam pembentukan undangundang. Publica Indonesia Utama.
Sahbana, S. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum. Warta Dharmawangsa, (51).
Selian, D. L., & Melina, C. (2018). Kebebasan berekspresi di era demokrasi: Catatan penegakan hak asasi manusia. Lex Scientia Law Review, 2(2), 189-198.
Wasiati, C. (2020). Partisipasi orang tua terhadap perlindungan anak sebagai suatu bentuk perlindungan hak asasi manusia. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 2(1), 119-144.
Wibawa, K. C. S. (2019). Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. Administrative Law and
Governance Journal, 2(1), 79-92.